

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional di negara-negara berkembang pada umumnya, terfokus pada pembangunan ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang diukur antara lain melalui Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat daerah baik Propinsi, Kabupaten maupun Kota.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan per kapita masyarakat yang berlangsung dalam jangka panjang. Sehingga dalam proses pembangunan harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti aspek pertumbuhan dan pemerataan serta dampak dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan sosial masyarakat. Dengan adanya upaya pembangunan yang dilakukan disuatu daerah maka diharapkan dapat mendorong perubahan struktur perekonomian daerah menuju kearah yang lebih baik.

Soeparmoko (2002) menyatakan bahwa Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada, dengan menjalin pola-pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dan pihak swasta guna penciptaan lapangan kerja, serta dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah bersangkutan. Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, sangat ditentukan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja secara optimal dari segi jumlah, produktivitas dan efisien (Nudiatulhuda, 2007).

Pembangunan suatu daerah harus memperhatikan sektor-sektor yang ada pada suatu daerah. Salah satu penentu keberhasilan pembangunan daerah adalah semakin

meningkatnya kesejahteraan kehidupan masyarakat daerah tersebut. Dengan adanya pembangunan di bidang ekonomi maka diharapkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik, tingkat kemakmuran semakin tinggi, kesempatan kerja semakin luas dan kualitas sumberdaya manusia semakin membaik.

Sementara itu, hal-hal yang berhubungan dengan arah kebijaksanaan, perencanaan, pengawasan maupun pembiayaan kegiatan pemerintah daerah menjadi wewenang dan tugas pemerintah daerah. Melihat keadaan tersebut, maka untuk mencapai tujuan dari suatu pembangunan daerah yaitu untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah, pemerintah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif untuk pembangunan daerah.

Kemakmuran suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan pada struktur ekonominya. Perubahan wilayah kepada kondisi yang lebih makmur tergantung pada usaha-usaha di daerah tersebut dalam menghasilkan barang dan jasa, serta usaha-usaha pembangunan yang diperlukan. Oleh karena itu kegiatan basis mempunyai peranan penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dimana setiap perubahan mempunyai efek multiplier terhadap perekonomian regional. Berdasarkan teori basis ekonomi, faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah (Arsyad,1999).

Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk di ekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan perencanaan dan strategi yang tepat karena disetiap daerah mempunyai keadaan yang berbeda, mempunyai karakteristik tersendiri, laju pertumbuhan ekonomi maupun potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Mengacu pada UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian dirubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Maka pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi dan pelaksanaan otonomi daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Sehingga segala potensi dan keanekaragaman yang dimiliki oleh masing-masing daerah diharapkan dapat meningkatkan proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu daerah yang otonomi memiliki kewenangan untuk mengatur dan melayani kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat dan merencanakan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan riil yang diterima oleh masyarakat ditunjukkan oleh Pendapatan Regional per kapita. Dimana pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator ekonomi yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran di suatu wilayah. PDRB per kapita juga merupakan gambaran nilai tambah masyarakat karena aktivitas antara PDRB per kapita dan pendapatan per kapita dari tahun ke tahun yang mengalami peningkatan. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan, dalam hal ini perhitungan menggunakan tahun 2000. PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung setiap tahun, sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Adapun kegunaan PDRB atas harga berlaku untuk melihat besarnya struktur perekonomian dalam satu daerah atau wilayah, sedangkan kegunaan PDRB atas harga konstan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

Dilihat dari pendapatan per kapita atas harga konstan Kabupaten Jember dari tahun ke tahun mengalami peningkatan selama kurun waktu 2004-2009. Dalam empat tahun

terakhir pendapatan per kapita Kabupaten Jember terus meningkat, pada tahun 2006 pendapatan per kapita sebesar Rp 3.509,44 meningkat 4,54% menjadi Rp 3.668,81 pada tahun 2007, di tahun 2008 meningkat lagi menjadi Rp 3.878,38 atau meningkat menjadi 5,71% dan di tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 5,22% atau naik sebesar Rp 4.081,09.

Pembangunan di Kabupaten Jember mengalami perkembangan yang semakin baik, hal ini ditunjukkan oleh angka pertumbuhan yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adanya peningkatan ini ditunjukkan oleh kenaikan angka pertumbuhan ekonomi yang terjadi di seluruh sektor ekonomi atau lapangan usaha. Laju pertumbuhan ekonomi yang berada dikisaran 5 persen menunjukkan perkembangan ekonomi Kabupaten Jember yang cukup stabil. Pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember berada pada 4,61% meningkat menjadi 5,65% di tahun 2005, di tahun 2006 juga mengalami peningkatan menjadi 5,70% meningkat lagi sebesar 5,98% pada tahun 2007 dan di tahun 2008 naik menjadi 6,04% namun mengalami penurunan di tahun 2009 menjadi 5,55%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Timur berada pada 5,83% di tahun 2004, mengalami penurunan di tahun 2006 menjadi 5,80% meningkat lagi menjadi 6,11% pada tahun 2007 namun kembali mengalami penurunan di tahun 2008 menjadi 5,94% dan di tahun 2009 menurun lagi menjadi 5,01%. Namun di tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Timur mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 6,68%.

Sedangkan jika dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember per sektor usaha, maka sektor yang pertumbuhannya cukup tinggi adalah sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 7,36 persen, sektor listrik dan air bersih 6,38 persen dan sektor industri pengolahan 6,10 persen. Untuk sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa pertumbuhannya mengalami penurunan.

Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember
Tahun 2004-2009 (Persen)

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur (%)	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember (%)
2004	5,83	4,61
2005	5,84	5,65
2006	5,80	5,70
2007	6,11	5,98
2008	5,94	6,04
2009	5,01	5,55

Sumber: BPS Kabupaten Jember dan Propinsi Jawa Timur

Namun jika dilihat dari distribusi persentase PDRB menurut sektor lapangan usaha, maka sektor pertanian memberikan kontribusi yang cukup tinggi sebesar 43,81 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran 19,47 persen, sektor jasa-jasa memberikan kontribusi sebesar 9,79 persen dan sektor industri pengolahan sebesar 7,19 persen terhadap total PDRB pada tahun 2009. Dengan kontribusi yang cukup tinggi dari beberapa sektor lapangan usaha maka akan meningkatkan PDRB dimana akan meningkatkan pula pendapatan per kapita masyarakat sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember Per Sektor Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2006-2009 (Persen)

Sektor	Pertumbuhan Ekonomi			
	2006	2007	2008	2009
Pertanian	5,40	5,92	5,71	5,24
Penggalian	3,34	5,78	6,10	5,69
Industri Pengolahan	3,96	6,22	6,18	6,10
Listrik dan Air Bersih	8,36	6,59	7,89	6,38
Konstruksi	6,52	5,99	6,02	5,95
Perdagangan, Hotel dan Restoran	7,20	6,03	6,15	5,9
Pengangkutan dan Komunikasi	4,73	5,80	7,16	7,36
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	7,06	6,59	6,43	5,42
Jasa - Jasa	5,57	5,71	6,22	4,86
PDRB	5,70	5,98	6,04	5,55

Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur, Tahun 2009

Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan dapat meningkatkan perluasan kesempatan kerja, mengurangi pengangguran dan secara makro dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang akan muncul jika peningkatan produksi dibawa keluar daerah sehingga dapat dimanfaatkan oleh penduduk diluar daerah tersebut yang akan mengurangi tingkat kesejahteraan daerah penghasil produksi. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis terdorong untuk menganalisis dan mengkaji lebih lanjut mengenai sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Jember, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema **“ANALISIS SEKTOR UNGGULAN UNTUK MENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2004-2009”**.

B. Batasan Masalah

Karena keterbatasan waktu dan mengingat ruang lingkup pembangunan ekonomi daerah yang sangat luas maka penulis membatasi pembahasan masalah pada sektor-sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Jember dan data yang digunakan adalah data tahunan dari tahu 2004 sampai dengan tahun 2009.

C. Rumusan Masalah

Berkaitan erat dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Sektor ekonomi manakah yang menjadi sektor unggulan dalam pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Jember dengan menggunakan beberapa alat analisis alternatif?

2. Bagaimanakah perubahan struktur ekonomi di Kabupaten Jember pada tahun 2004-2009?
3. Bagaimanakah kondisi basis ekonomi sektoral di Kabupaten Jember pada tahun 2004-2009?

D. Tujuan Penelitian

Merujuk pada perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi yang menjadi sektor unggulan dalam pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Jember dengan menggunakan beberapa alat analisis alternatif.
2. Untuk mengetahui perubahan struktur ekonomi di Kabupaten Jember pada tahun 2004-2009.
3. Untuk mengetahui kondisi basis ekonomi sektoral di Kabupaten Jember pada tahun 2004-2009.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, beberapa manfaat yang kita peroleh antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapat baik melalui perkuliahan maupun diluar perkuliahan dan pada akhirnya menjadi bekal dalam menghadapi persaingan dalam kehidupan yang realistis.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan gambaran kepada masyarakat tentang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah Kabupaten jember.